



Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/BKKBN

**Ayah Wajib  
Hadir!**



# POSTER SYMPOSIUM

dari Keluarga untuk **Indonesia Emas**

Dalam rangka memperingati

**Hari Keluarga Nasional**  
& **World Population Day 2026**

**KEDEPUTIAN BIDANG KEBIJAKAN STRATEGI DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

**Ditkesdalduk**


**Ditkesakpel**

**Ditkesbangga**

**Ditkestaman**



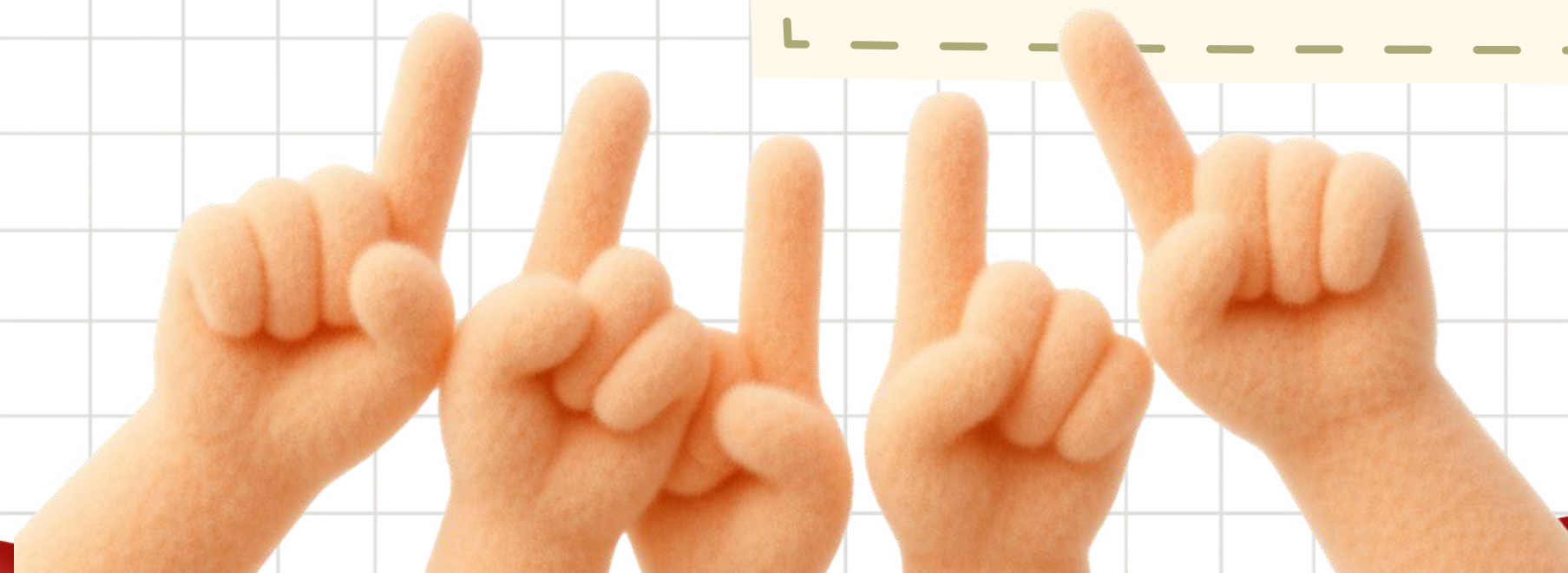
**HARI  
KELUARGA  
NASIONAL** | 29  
JUNI  
2026  
AYAH WAJIB HADIR



# POSTER SYMPOSIUM

dari Keluarga untuk **Indonesia Emas**

Dalam rangka memperingati **Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)** dan **World Population Day (WPD)** Tahun 2026, Kedeputan Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan kegiatan: **Jakstra Poster Symposium Tahun 2026** sebagai wadah diseminasi hasil kajian, inovasi, dan praktik baik yang mendukung pembangunan kependudukan dan keluarga. Kegiatan ini menampilkan kajian kebijakan dari empat direktorat pada Kedeputan Jakstra-BK, yaitu Ditkesdalduk, Ditkesbangga, Ditkesakpel, dan Ditkestaman. Symposium ini diharapkan menjadi sarana berbagi pengetahuan, memperkuat jejaring, serta meningkatkan pemanfaatan hasil kajian dalam perumusan kebijakan pembangunan keluarga dan kependudukan.





# POSTER SYMPOSIUM

dari Keluarga untuk **Indonesia Emas**

**Ditkesdalduk**

**Kehadiran Ayah dalam Pengasuhan Anak: Agenda Kebijakan Pembangunan Keluarga di Tengah Transisi Demografi Indonesia**

Asep Sulaimani, S.Si., MAPS

**Ditkesbangga**

**Metode Sosialisasi Efektif untuk Mengurangi Discontinuation of Contraception Rate (DCR) di Indonesia**

Dr. Maria Gayatri, S.Si., MAPS

**Ditkesakpel**

**Menuju Indonesia Ramah Lansia: Strategi Kebijakan Menghadapi Aging Population Menuju Indonesia Emas 2045**

Adam Sugiharto, SE.,M.Si

**Ditkestaman**

**Memutus Rantai Pernikahan Anak: Lindungi Generasi, Wujudkan Indonesia Emas!**

Ristya Ira Murti, SE, MAPS

**Ditkesdalduk**

**Ayah Hadir di Era Digital: Memperkuat Pengasuhan, Melindungi Anak, Membangun Ketahanan Keluarga**

Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom., M.Si & Nurillah Hikmatiyar Fityora, S.AP

**Ditkesbangga**

**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana "Mengatasi Tantangan Pembangunan di Daerah" (Studi Kasus di Jawa Tengah)**

Niken Akhirini S.Sos., M.I.Kom

**Ditkesakpel**

**Mewujudkan Kelahiran Anak yang Diinginkan Untuk Masa Depan yang Cerah dan Bermartabat**

Fifi Husnil Fitry, SS, M.Si

**Ditkestaman**

**Menangani Fenomena Anak Menjanda di Usia Sekolah: Perlindungan Anak dan Kelanjutan Pendidikan**

Ristya Ira Murti, SE, MAPS

# Peran Ayah dalam Transisi Demografi Indonesia

Indonesia memasuki Second Demographic Transition (SDT). Fertilitas yang menurun, bonus demografi yang masih berjalan, dan perubahan struktur keluarga menggeser fokus kebijakan kependudukan menuju kualitas keluarga dan anak. Karena itu, kesenjangan keterlibatan ayah perlu diposisikan sebagai isu kebijakan pembangunan keluarga



## Hambatan struktural keterlibatan ayah



**26,31 %**  
Ayah bekerja lebih dari 50 jam per minggu



**6,58 %**  
Ayah bekerja sebagai komuter atau ulang-alik



**4,31 %**  
Ayah bekerja di luar daerah lebih dari satu minggu



**38,27 %**  
Ayah merupakan pekerja rentan



**58,12 %**  
Ayah berpendidikan ≤ SMP

Sumber: BPS, Sakernas 2025

### Fertilitas Menurun



TFR Indonesia menurun menjadi **2,13** pada SUPAS 2025 dan diproyeksikan **2,08** pada 2029

Sumber: SUPAS 2025; proyeksi 2029

### Bonus Demografi



Bonus demografi diperkirakan berlangsung hingga sekitar 2040; penduduk usia 15-64 tahun hampir 70%

Sumber: BPS, proyeksi penduduk

### Struktur Keluarga Berubah



Keluarga inti turun dari **64,66%** pada 2000 menjadi **58,86%** pada 2020, sementara rumah tangga multigenerasi naik dari **12,20%** menjadi **15,86%**

Peningkatan *single person household* dari **5,76%** tahun 2000 menjadi **8,03%** di tahun 2020

Sumber: Diolah dari Susenas 2000, 2010, 2020

### TANTANGAN BARU:



Demographic anxiety



Population decline



Aging population

## Masalah Utama: Kesenjangan Keterlibatan Ayah



**25,8 %**

Keluarga dengan anak mengalami kesenjangan keterlibatan ayah (*Fatherless*)



**20,8** Juta

anak terdampak



### Catatan:

Dalam PK 2025, istilah *fatherless* merujuk pada rendahnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan, bukan semata ketiadaan ayah secara biologis

### Mengapa itu penting?



**80,5** Juta

anak usia 0-17 tahun di Indonesia

Sumber: BPS, Susenas 2025



**58,3 %**

anak tinggal di perkotaan **41,6 %** di pedesaan

Sumber: BPS, Susenas 2025



**73,9 %**

anak usia 5-17 tahun menggunakan internet

Sumber: BPS, Susenas 2024

Jumlah anak yang besar, kehidupan perkotaan, dan paparan internet menuntut keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan

## Diagnosa Kebijakan

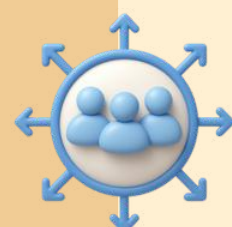
Kesenjangan keterlibatan ayah dipengaruhi oleh norma pengasuhan yang masih berpusat pada ibu, tuntutan kerja dan mobilitas, kerentanan ekonomi, serta profil pendidikan ayah yang mayoritas berada pada jenjang SMP ke bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain edukasi dan layanan pengasuhan belum cukup adaptif terhadap realitas ayah, sehingga perlu dibuat lebih sederhana, praktis, fleksibel, dan mudah diakses untuk mendukung kehadiran serta keterlibatan ayah dalam keluarga.

## Rekomendasi Kebijakan



Integrasikan modul pelibatan ayah dalam edukasi pranikah 1000 HPK, BPK/BKR, dan pengasuhan remaja

Dorong tempat kerja ramah keluarga melalui cuti ayah, fleksibilitas kerja, dan dukungan bagi pekerja komuter atau migran



Perluasan kelas ayah dan parenting digital berbasis komunitas, sekolah, dan platform daring

Manfaatkan PK 2025 untuk menyasar keluarga rentan dan anak dengan keterlibatan ayah yang rendah





# Metode Sosialisasi Efektif untuk Mengurangi Discontinuation of Contraceptive Rate (DCR) di Indonesia



SCAN DI SINI UNTUK KAJIAN LEBIH LENGKAP



## Latar Permasalahan

DCR di Indonesia (2023):

**20,7%**

(di atas target 21,6%)

DCR MKJP: **15,1% - 15,7%**

DCR Non-MKJP: **27,5% - 31,2%**

DCR Non-MKJP 2X lebih tinggi dari DCR MKJP

## Dampak DCR



5 dari 100 WUS yang DCR mengalami kehamilan tidak diinginkan dalam 3 bulan pertama.

Sosialisasi yang kurang optimal dan konseling yang kurang berkualitas dapat meningkatkan risiko DCR.

DCR menunjukkan kurangnya penerimaan terhadap metode atau kualitas layanan KB yang belum memenuhi harapan, sehingga memerlukan intervensi komprehensif dan berkelanjutan.



## Metodologi



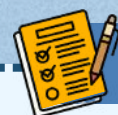
Kajian Literatur



Diskusi Kelompok Terarah (FGD)



Konsultasi dengan Pembuat Keputusan



## Hasil Kajian

### SASARAN PRIORITAS?

Perempuan, Pasangan, & Influencer

- 94% pengguna kontrasepsi adalah perempuan → sasaran primer.
- Suami/pasangan berperan penting dalam pengambilan keputusan → sasaran sekunder.
- Influencer media sosial menjangkau massive, termasuk Generasi Z.



### PESAN KUNCI PRIORITAS?

Lengkap & Responsif

- >40% akseptor tidak menerima informasi lengkap tentang efek samping & metode alternatif.
- Konten harus disesuaikan dengan profil target: usia, pendidikan, status sosial-ekonomi, & metode kontrasepsi.
- Manfaatkan AI & big data untuk kebutuhan informasi yang tepat.



### KANAL PRIORITAS?

Interpersonal & Sosial Media

- Konseling interpersonal terbukti efektif menurunkan DCR.
- Kanal digital sangat strategis: 64% usia 18-34 tahun di Indonesia hampir selalu online.
- Pendekatan omni-channel mengintegrasikan digital & non-digital.



## Rekomendasi Kebijakan

- **Strategi omnikanal** yang mengintegrasikan pendekatan interpersonal dan kanal digital harus dikembangkan.
- Utilisasi **media sosial** harus mendapat perhatian khusus, namun sosialisasi interpersonal melalui **konseling dan penyuluhan telah terbukti efektivitasnya**.
- Informasi disampaikan secara **komprehensif namun responsif** terhadap kebutuhan sasaran, termasuk dengan memanfaatkan teknologi AI dan big data.

### Implementasi rekomendasi memerlukan penguatan di tiga front:



Identifikasi sasaran melalui **pembaruan data** berkala untuk identifikasi DCR dan kebutuhan informasi. Influencer yang relevan harus mulai dilibatkan.



Kanal prioritas diperkuat melalui **peningkatan kompetensi** tenaga non-professional dan **advokasi organisasi profesi** untuk optimalisasi peran dokter dan bidan, serta **pengembangan strategi digital** memanfaatkan super-app.



Pengembangan **konten digital yang komprehensif dan engaging** untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok sasaran.



# "MENUJU INDONESIA RAMAH LANSIA: STRATEGI KEBIJAKAN MENGHADAPI AGING POPULATION MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

disusunoleh:PujiPrihatiningsih,S.PSi,MM, AdamSugiharto,SE,M.Si, AlifianugrahaniSidhi,S.K.M, IndraAdithyantiPutri,S.AP  
 DirektoratKebijakanStrategiBidang PeningkatanAksesdan KualitasPembangunandan PelayananKeluarga

## Urgensi & Deskripsi Masalah: Ledakan Penduduk Lansia



## KETERGANTUNGAN TINGGI PADA PERAWATAN KELUARGA



## KERENTANAN EKONOMI & KESEHATAN LANSIA (2024)



## AKAR MASALAH & TEKANAN SISTEM

### MELEMAHNYA KAPASITAS PERAWATAN KELUARGA

- Urbanisasi dan migrasi tenaga kerja
- Meningkatnya partisipasi perempuan bekerja
- Ukuran keluarga semakin kecil
- Fenomena sandwich generation

## DAMPAK DAN KEBIJAKAN SEKTORAL

- Beban pembiayaan kesehatan/jaminan sosial semakin meningkat
- Potensi tekanan fiskal terhadap pembangunan nasional. Kebijakan (UU 13/1998, UU 17/2023, UU 52/2009) belum terintegrasi optimal

## REKOMENDASI: HYBRID ELDERLY CARE SYSTEM



## STRATEGI KEBIJAKAN: ANALOGI KENDARAAN PELAYANAN



## ROADMAP PRIORITAS KEBIJAKAN 2025-2045

2025-2030	2030-2035	2035-2045
<b>FASE PENGUATAN FONDASI &amp; INTEGRASI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Grand Design Nasional</li> <li>Penguatan Posyandu Lansia</li> <li>Integrasi layanan kesehatan-sosial-perawatan jangka panjang</li> </ul>	<b>FASE EKSPANSI LAYANAN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Long-Term Care berbasis komunitas</li> <li>Digitalisasi data</li> <li>Pengembangan silver economy</li> </ul>	<b>FASE MASYARAKAT RAMAH LANSIA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem LTC nasional berkelanjutan</li> <li>Partisipasi produktif lansia optimum</li> <li>Kontribusi bagi Indonesia Emas 2045</li> </ul>

## SCAN BARCODE UNTUK KAJIAN LEBIH LENGKAP



# MEMUTUS RANTAI PERNIKAHAN ANAK:

Lindungi Generasi, Wujudkan Indonesia Emas!

DISUSUN OLEH:  
RISTYA IRA MURTI, SE, MAPS DAN  
SRI SULASTRI MANALU, S.A.P  
MEI 2026

DIREKTORAT KEBIJAKAN STRATEGI BIDANG PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA DAN KEMANDIRIAN KELUARGA BERENCANA



## DAMPAK SISTEMIK TERHADAP NEGARA

### PRAKTIK PERNIKAHAN DINI



#### SEKTOR KESEHATAN

- AKI & AKB naik
- Bayi stunting
- KDRT/trauma
- IPM menurun



#### SEKTOR PENDIDIKAN

- Putus sekolah massal
- Skill kerja rendah
- IPM menurun



#### SEKTOR EKONOMI

- Kemiskinan sistemik
- Pekerja informal
- Pengangguran
- IPM menurun



### MENGAPA PERNIKAHAN ANAK HARUS DICEGAH?



#### CEGAH RISIKO KESEHATAN

Remaja ibu berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan.



#### LINDUNGI MASA DEPAN PENDIDIKAN

Pernikahan dini sering memutus pendidikan dan menghambat kesempatan kerja.



#### PUTUS SIKLUS KEMISKINAN

Pernikahan anak memperbesar risiko kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.



#### BANGUN GENERASI BERKUALITAS

Anak dari pernikahan anak lebih berisiko stunting dan putus sekolah.



### FAKTA PENTING (BPS, SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL 2023)

**5,90%**

Remaja perempuan usia 20–24 tahun pernah menikah sebelum usia 18 tahun.



### DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN



**90%**  
Risiko Stunting Anak lebih tinggi



**80%**  
Risiko Putus Sekolah lebih tinggi



**75%**  
Kerentanan KDRT lebih tinggi



**20%**  
Partisipasi Kerja Perempuan lebih rendah



**25%**  
Ketimpangan & Kemiskinan lebih besar

### REKOMENDASI KEBIJAKAN



#### PILAR HUKUM

Tegakkan Regulasi  
Perkuat implementasi UU Perkawinan dan penegakan hukum secara konsisten.



#### PILAR SOSIAL

Edukasi & Layanan  
Perluas edukasi kespro, layanan konseling & pendampingan remaja dan keluarga.



#### PILAR EKONOMI

Berdayakan Perempuan  
Tingkatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja perempuan muda.



#### KOLABORASI Semua Pihak

Pemerintah, masyarakat, sekolah, agama, media, dan keluarga bekerja bersama mencegah pernikahan anak.

### 1 KESEHATAN IBU DAN BAYI

Remaja ibu berisiko tinggi komplikasi kehamilan, persalinan, dan melahirkan bayi stunting.



### 2 PENDIDIKAN

Pernikahan dini menyebabkan putus sekolah, kontinuitas pendidikan terhenti, dan skill kerja rendah.



### 3 EKONOMI

Peluang kerja terbatas, upah rendah, lebih sering bekerja informal, dan risiko kemiskinan antar generasi semakin besar.



SCAN DI SINI UNTUK KAJIAN LEBIH LENGKAP



# AYAH WAJIB HADIR DI ERA DIGITAL

Penguatan Peran Ayah dalam Pengasuhan Digital untuk Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga  
*Anak makin online. Ayah tidak boleh offline dari pengasuhan.*



## 1 LATAR BELAKANG

- Ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan anak
- Peningkatan akses digital belum selalu diikuti kesiapan keluarga dalam mendampingi, mendengar dan merespon risiko yang dialami anak
- Karena itu kehadiran ayah perlu diperkuat dalam praktik pengasuhan digital sehari-hari

## 2 DATA KUNCI

Pentingnya memahami tantangan pengasuhan digital anak di Indonesia

<p><b>73,9%</b> Anak usia 5-17 Tahun mengakses internet Sumber: BPS/Susenas 2024; dikutip KememPPPA, 2026</p>	<p><b>51%</b> Anak tidak membagikan pengalamannya daringnya pada siapapun Sumber: UNICEF Indonesia, Studi Dasar 2023</p>	<p><b>42%</b> Anak merasa takut atau tidak nyaman karena pengalaman daring Sumber: UNICEF Indonesia, 2023/2025</p>	<p><b>25,8%</b> Keluarga yang memiliki anak mengalami fatherless Sumber: PK-25 Kemendukbangga/BKKBN</p>
---	--	--	---

**Catatan risiko:** 50,3% anak pernah melihat gambar seksual di media sosial; 14,49% anak laki-laki dan 13,78% anak perempuan usia 13-17 tahun pernah mengalami cyberbullying.

## 4 TEMUAN ANALISIS

- Masalah utama bukan hanya penggunaan gawai, tetapi lemahnya komunikasi dan pendampingan keluarga
- Anak tidak selalu bercerita saat mengalami pengalaman daring yang mengganggu
- Peran ayah perlu dibuat lebih eksplisit dalam pengasuhan digital keluarga
- Edukasi keluarga perlu ditargetkan menurut usia, wilayah dan kerentanan

## 5 IMPLIKASI KEBIJAKAN

- Regulasi sudah tersedia. Tantangannya adalah memastikan perlindungan anak digital hadir dalam praktik pengasuhan harian di rumah. Di sinilah ayah wajib hadir: mendampingi, mendengar, menyepakati aturan gawai, mengenali risiko, dan merespons dengan ramah anak.
- PP TUNAS / PP 17/2025
  - Perpres 87/2025
  - SKB 7 Menteri Digital & AI
  - GATI & Gernas RANA

## 3 ALUR LOGIKA KEBIJAKAN



## 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN

- Integrasikan materi Ayah Wajib Hadir  
Masukkan ke layanan pengasuhan keluarga: komunikasi ayah-anak, aturan gawai keluarga, tanda risiko digital, privasi anak, dan respons awal ramah anak.
  - Perkuat edukasi keluarga melalui poktan dan layanan BKB, BKR, PIK-R, Kampung KB, Kelas Ayah, dan Satyagraha/PPKS dapat menjadi wadah edukasi pengasuhan digital keluarga.
  - Bekali lini lapangan dengan pesan kunci dan alur rujukan  
Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan PKB/PLKB berperan sebagai edukator awal: mendengar anak, mengamankan situasi, memberi informasi, dan merujuk bila diperlukan.
- Dengarkan anak
  - Amankan situasi
  - Beri informasi
  - Rujuk bila diperlukan

### Penyusun:

- Yuniar Rachmayanti, S.I.Kom., M.Si — Analis Kebijakan Ahli Muda
- Nurillah Hikmatiyar Fitroya, S.AP — Analis Kebijakan Ahli Pertama



# Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB & PLKB

## "Mengatasi Tantangan Pembangunan Keluarga di Daerah"

### Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 2025



SCAN DI SINI  
UNTUK KAJIAN  
LEBIH LENGKAP

#### Latar Belakang

Jumlah dan distribusi Penyuluh KB/PLKB yang belum memadai menyebabkan tingginya beban kerja di lapangan, sehingga pelaksanaan Program Bangga Kencana dan pencapaian indikator pembangunan keluarga belum berjalan secara optimal.



**1.896**  
tenaga penyuluh di  
Jawa Tengah



#### Data

- Jumlah tenaga PKB/PLKB (s/d Juli 2025) **18.025 orang**
- Masih sangat kurang dibandingkan **83.971 desa/kel(21,5%)** dan 7.277 kecamatan yang tersebar di 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia.



#### Metodologi



Kajian Literatur



Diskusi Kelompok Terarah (FGD)



Konsultasi dengan Akademisi

#### Deskripsi Permasalahan

##### Peran Penyuluh KB & PLKB

Menjalankan **peran ganda**, yaitu memenuhi mandat pusat sekaligus mengejar target kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah, sehingga sering merasa "berdiri di atas dua kaki".

##### Perencanaan SDM dan Sarana Kerja

Dalam perencanaan kebutuhan SDM, **daerah bersifat pasif** karena **menunggu penugasan dari pusat** meskipun telah melakukan pemetaan kebutuhan. **Sarana kerja yang disediakan oleh pemerintah daerah berbeda-beda antarwilayah.**

##### Perencanaan SDM dan Sarana Kerja

Di Jawa Tengah, satu penyuluh harus menangani 3-6 desa/kelurahan, menyebabkan **beban kerja tidak ideal dan capaian program Bangga Kencana tidak merata.**

##### Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kompetensi penyuluh terkendala karena daerah memiliki **anggaran terbatas** dan lebih memprioritaskan pelatihan bagi kader lokal. Sementara itu, **pelatihan dari pusat hanya dilakukan sekitar setahun sekali** dan sebagian besar berbasis daring.



#### Rekomendasi Kebijakan

- **Analisis kelembagaan harus dilakukan** guna menata ulang struktur Perangkat Daerah yang menangani Pengendalian Penduduk dan KB agar diperoleh struktur organisasi yang paten dan seragam.
- **Edukasi proaktif, sosialisasi dan diseminasi informasi secara intens, terus menerus dan terstruktur tentang tupoksi dan peta jabatan fungsional PKB & PLKB.**
- **Berfokus pada efektivitas peran petugas dalam pelaksanaan program Bangga Kencana di wilayah binaan dan penempatannya.**
- **Perlu restrukturisasi dan penataan ulang khususnya untuk jabatan fungsional PLKB di daerah.**
- **Pemetaan ulang aktivitas pekerjaan Penyuluh KB/PLKB di desa/wilayah binaan** perlu dilakukan berdasarkan kapasitas tugas dan jenjang jabatan fungsionalnya
- **Perlu sinergitas regulasi yang mengatur pemanfaatan Penyuluh KB/PLKB di Daerah karena komitmen dan dukungan Daerah sangat dibutuhkan.**
- Secara bertahap **perlu penambahan tenaga Penyuluh KB/PLKB di Daerah** agar diperoleh kinerja program "Bangga Kencana" yang optimal dan proporsional sesuai kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki petugas dan juga sesuai dengan kebutuhan Daerah.



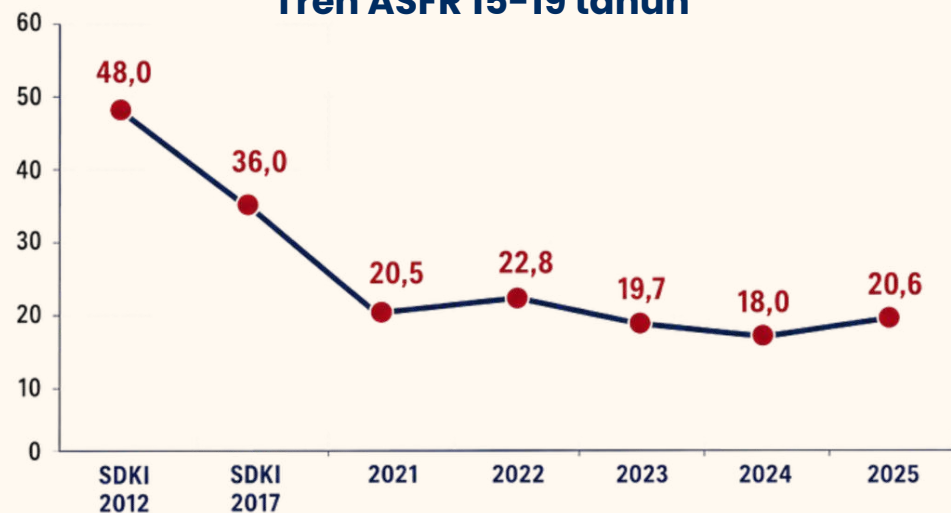


# Mewujudkan Kelahiran Anak yang Diinginkan Untuk Masa Depan yang Cerah dan Bermartabat

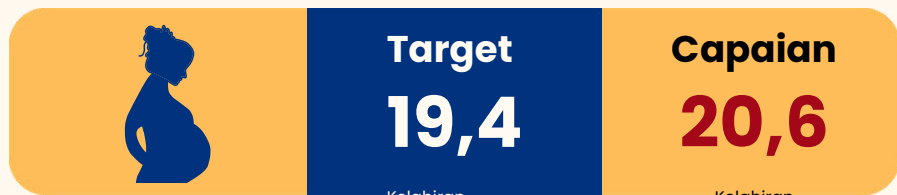
Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga

## Mengapa Penting?

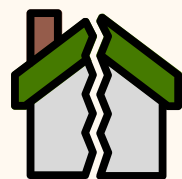
Tren ASFR 15-19 tahun



## ASFR 15-19 tahun Indonesia Tahun 2025



## Akar Masalah Utama



Konflik rumah tangga, pola asuh permisif, lemahnya komunikasi orang tua-anak, kurangnya pengawasan, serta tekanan ekonomi keluarga.



Pengaruh teman sebaya, budaya permisif terhadap seks bebas, paparan pornografi & media sosial tanpa kontrol, serta rendahnya pendidikan karakter.



Akses remaja terhadap edukasi kesehatan reproduksi, layanan konseling, dan pendampingan masih terbatas, terutama di wilayah pedesaan dan kelompok rentan.

## Rekomendasi Kebijakan

- 1 Penguatan Program Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja
- 2 Peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja
- 3 Kebijakan lintas sektor yang terintegrasi dan komprehensif



## Dampak



### Aspek Kesehatan

Kematian ibu, stunting, kesehatan mental ibu, komplikasi kehamilan dan kelahiran.



### Aspek Pendidikan

Putus sekolah, rendahnya keterampilan, dan keterbatasan akses pendidikan



### Aspek Sosial Ekonomi

Rantai kemiskinan baru, kekerasan rumah tangga, dan kenakalan remaja



### Aspek Pembangunan

Bonus demografi tidak optimal, kualitas SDM rendah, tingginya beban pembiayaan kesehatan

## Highlight



Terwujudnya generasi emas 2045 yang sehat, produktif, dan bermartabat

Scan barcode untuk kajian lebih lengkap





# MENANGANI FENOMENA ANAK MENJANDA DI USIA SEKOLAH:

## Perlindungan Anak dan Kelanjutan Pendidikan

Setiap Anak Berhak Belajar, Bermimpi, dan Meraih Masa Depan



### DATA DAN FENOMENA KRITIS

Perceraian Anak di Bawah Usia 18 Tahun (2024)

394,608 Kasus

TINGKAT PERCERAIAN 3X LIPAT!



### DAMPAK UTAMA



### FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN ANAK

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Ketidaksiapan Mental
- Ketidakmampuan Finansial

### REKOMENDASI KEBIJAKAN IMPLEMENTATIF

#### 1 MANDAT RE-ENTRY KE SEKOLAH



- Aturan Kemendikdasmen.
- Sekolah Tidak Boleh Menolak.
- Beasiswa KIP Khusus.

#### 2 INTEGRASI LAYANAN "LAPOR KE BELAJAR"



- PA Beri Data ke Dinas Pendidikan.
- Pendampingan Anak Kembali Belajar.

#### 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI



- Pelatihan Keterampilan Digital/UMKM.
- Kemandirian Finansial.

#### 4 KAMPANYE ANTI-STIGMA



- Sosialisasi Lewat Puspaga (DPPPA).
- Menghapus Stigma di Desa.

#### 5 INTERVENSI HULU DAN HILIR PROGRAM KEMENDUKBANGGA



- Pendewasaan Usia Perkawinan.
- Optimalisasi Program GenRe.
- Penguatan Aplikasi ELSIMIL.



“ ANAK MENJANDA BUKAN SEKADAR STATISTIK, TAPI KEGAGALAN SISTEM PERLINDUNGAN. FOKUS: REHABILITASI DAN INTEGRASI PENDIDIKAN. ”

Disusun Oleh Ristya Ira Murti, SE, MAPS (Tim Editor DITKESTAMAN)  
Sumber Data: Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, BPS, KemenPPPA, BKKBN (2024)



SCAN DI SINI Untuk kajian lebih lengkap



Kementerian Kependudukan dan  
Pembangunan Keluarga/BKKBN



HARI  
KELUARGA  
NASIONAL | 29  
JUNI  
2026  
AYAH WAJIB HADIR



# POSTER SYMPOSIUM

dari Keluarga untuk **Indonesia Emas**